

RINGKASAN

**Riana Rahma Dewi
200510138**

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBEBASAN LAHAN MASYARAKAT UNTUK
PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM PLTA
PEUSANGAN 1&2 (PENELITIAN DI KAMPUNG
ANGKUP KECAMATAN SILIH NARA
KABUPATEN ACEH TENGAH)**

(Dr, Mukhlis.SH.,MH dan Nuribadah,S.H.,M.H)

Sengketa tanah yang terjadi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu contoh dinamika konflik pertanahan antara pemerintah, pihak perusahaan, dan masyarakat setempat, timbulnya sengketa ini menunjukkan bahwa terdapat tidak sesuai proses pengadaan tanah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dengan proses pembebasan lahan di masyarakat, sehingga mengakibatkan konflik sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa lahan masyarakat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Peusangan yang melibatkan mediasi, verifikasi data, serta peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan indikator, serta mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa antara instansi dengan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode kualitatif data diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden dan observasi lapangan serta mengkaitkan dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan PLTA Peusangan dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mediasi yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tim verifikasi independen. Proses ini mencakup validasi dokumen kepemilikan lahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kendala yang dihadapi meliputi hilangnya dokumen pembebasan lahan periode 1990–2000, perbedaan klaim kepemilikan, serta ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap hasil verifikasi. Upaya penyelesaian meliputi verifikasi ulang dokumen, keterlibatan tim independen, serta pemberian kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur peradilan sebagai langkah hukum terakhir.

Saran dari hasil penelitian ini adalah kepemilikan sertifikat tanah sangat penting diharapkan pemerintah mensosialisasi dan memfasilitasi masyarakat dalam melakukan legalisasi tanah untuk menghindari konflik sengketa tanah di sekitar wilayah pembangunan PLTA Peusangan. Partisipatif semua pihak masyarakat dalam proses pembebasan lahan agar sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Pengadaan Tanah, PLTA Peusangan.

ABSTRACT

Riana Rahma Dewi
200510138

**DISPUTE RESOLUTION MECHANISM
REGARDING COMMUNITY LAND ACQUISITION
FOR THE DEVELOPMENT OF THE PEUSANGAN
1&2 PLTA PUBLIC INTEREST (RESEARCH IN
ANGKUP VILLAGE, SILIH NARA DISTRICT,
CENTRAL ACEH REGENCY)**

(Dr, Mukhlis.SH.,MH dan Nuribadah,S.H.,M.H)

Land disputes arising from the construction of the Peusangan Hydropower Plant (PLTA Peusangan) in Aceh Tengah Regency represent a significant example of land conflict dynamics involving the government, the company, and the local community. The emergence of these disputes indicates a discrepancy between the land acquisition processes as mandated by Law Number 2 of 2012 and the actual land clearance practices within the community, leading to social conflict.

This research aims to explain the mechanisms for resolving land disputes in the construction of the Peusangan Hydropower Plant, including mediation, data verification, and the role of the local government as a facilitator and indicator of conflict resolution success. Additionally, it seeks to identify the challenges and efforts involved in resolving the disputes between government agencies and the community.

The study employs a socio-legal (empirical juridical) approach using qualitative methods. Data were collected through interviews with respondents, field observations, and literature reviews linked to Government Regulation Number 21 of 2022 on the Implementation of Land Dispute Resolution.

The results indicate that the Aceh Tengah Regency government plays a crucial role in facilitating meetings between the Peusangan Hydropower Plant project and local landowners. Through mediation forums facilitated by the Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) and independent verification teams, agreements were reached regarding the validation of land ownership documents, the determination of compensation values, and transparent payment schedules. These agreements are based on the principles of deliberation and consensus in line with Presidential Regulation Number 71 of 2012 and Ministerial Regulation ATR/BPN Number 19 of 2021.

The study concludes that the mechanism for resolving land acquisition disputes in the construction of the Peusangan Hydropower Plant predominantly involves mediation. Mediation is considered the preferred approach as it effectively mitigates social conflict and provides a platform for dialogue among the community.

Keyword: Dispute Resolution: Land Acquisition, Peusangan Hydroelectric Power Plant.